



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASIH RAHAYU PAMUNGKAS**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA**
3. NHK : **948540**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **605.000.000**

1. Tanah Seluas 270 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp.
40.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/77 m2 di KOTA SAMARINDA ,
WARISAN Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 7500 m2 di KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI
Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **129.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOTER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **17.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	165.933.634
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	916.933.634
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	916.933.634

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.